**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA**

*(Studi Kasus di Kelurahan Siantan Hulu)*

**Oleh : AFIF REFFYANDI**

**ABSTRAKSI**

Program Raskin adalah program bantuan beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah dan merupakan bagian tak terpisahkan dari program ketahanan pangan. Program ini sebagai upaya meningkatkan akses dalam memenuhi hak dasar masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan dan efektivitas dari program Raskin, mengetahui apakah ada surplus konsumen yang diperoleh para rumah tangga penerima manfaat dari subsidi Raskin serta mengetahui kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program Raskin dikelurahan Siantan Hulu.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Sumber data yaitu data primer dan data skunder, sedangkan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuisioner dan wawancara langsung serta data dari instansi yang terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 100 orang yang terdiri dari 68 laki-laki dan 32 perempuan.

Dari penelitian ini didapat hasil bahwa Evaluasi Program Raskin (beras untuk keluarga miskin) di kelurahan Siantan Hulu sudah berjalan dengan efektif. Dimana dengan tingkat keberhasilan rata-rata keseluruhan dari enam indikator program raskin sebesar 92,33% yang menunjukan lebih besar dari 80% sehingga dikatakan efektif. Indikator tepat sasaran sebesar 63%, tepat harga penjualan raskin Rp.1600,- per kilogram sebesar 100%, tepat jumlah dalam hitungan berat 15 kg per kepala keluarga sebesar 91%, tepat waktu dalam setiap pendistribusian sebesar 100% dan tepat administrasi penyaluran raskin sebesar 100% serta tepat kualitas beras raskin untuk dikonsumsi sebesar 100%. Dari penelitian juga diperoleh surplus bagi rumah tangga miskin sebesar Rp.61.650 per kepala keluarga yang membeli beras dengan harga yang lebih murah yaitu Rp.24.000 per 15 kg dengan harga Rp.1600 per kilogram dibandingkan harga pasar yaitu Rp.85.650 per 15 kg dengan harga Rp.5710 per kilogram.

Kata Kunci *: Efektivitas Raskin, Surplus Konsumen, Subsidi Harga.*

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Pangan adalah salah satu hak asasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kesepakatan Internasional, yaitu *Universal Declaration of Human Right (1948), Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996, Milennium Development Goals (MDGs)*.(Bulog,2011). Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup dan karenanya kecukupan pangan bagi setiap orang setiap waktu merupakan hak azasi yang layak dipenuhi dan pangan merupakan kebutuhan manusia yang dianggap strategis dan sering mencakup hal-hal yang bersifat emosional bahkan politis.

Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi masyarakat miskin. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya. Beras memiliki urutan utama dari jenis bahan pangan yang dikonsumsi.

Hampir seluruh penduduk Indonesia menjadikan beras sebagai bahan pangan utama, beras merupakan nutrisi penting dalam struktur pangan, karena itu peranan beras memiliki peranan strategis dalam kehidupan bangsa Indonesia.

 Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal kehidupannya. Standar minimal kebutuhan hidup ini berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makan terutama energi kalori sehingga kemungkinan seseorang biasa bekerja untuk memperoleh pendapatan. Patokan tingkat kecukupan kalori yang dijadikan acuan adalah sebesar 2.100 kalori setiap orang per hari untuk makanan. Hal ini harus mendapat perhatian serius karena keadaan ekonomi ini relatif mudah diukur dan berpengaruh besar pada konsumsi pangan.

Golongan miskin menggunakan bagian terbesar dari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil suatu kebijakan yaitu kebijakan harga maksimum dan menstabilkan pendapatan serta memberi subsidi berupa Raskin. Peranan beras dapat dilihat dari aspek ekonomi, sosial, dan politik, kerawanan pangan biasanya akan lebih mudah menyulut keresahan masyarakat, akibatnya harga beras naik tajam dan mendorong terjadinya protes masyarakat yang mana masyarakat harus mengalokasikan pendapatan lebih guna mendapatkan beras.

Sejak krisis pangan tahun 1998, pemerintah konsisten memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan hak pangan masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). OPK memberikan subsidi beras secara *targeted* kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang rawan pangan. Pada tahun 2002 OPK diubah menjadi Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Program Raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat.

Program Raskin sebagai program bantuan beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah, merupakan bagian tak terpisahkan dari program ketahanan pangan. Program ini sebagai upaya meningkatkan akses dalam memenuhi hak dasar masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan. Pemerintah memberikan bantuan subsidi beras tidak hanya terhadap masyarakat yang sangat miskin dan miskin, akan tetapi juga masyarakat yang hampir miskin. Jika rata-rata konsumsi beras saat ini 180 kg/kapita/tahun dan setiap RTS-PM terdiri atas 4 (empat) jiwa, maka Program Raskin telah memberikan kontribusi sebesar 39,6% dari kebutuhan beras setiap bulannya bagi setiap RTS.

Keberhasian Program Raskin dapat dicapai melalui koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi antar Kementrian/Lembaga (K/L) terkait baik pusat dan daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian, dengan dilandasi pemahaman bahwa Raskin adalah hak orang miskin.

Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada dibawah suatu batas yang disebut batas garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Melalui pendekatan sosial masih sulit mengukur garis kemiskinan masyarakat, tetapi dari indikator ekonomi secara teoritis dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran.

 Berikut ini adalah langkah-langkah dalam penetapan Pagu Raskin, yaitu :

1) Penetapan Pagu Raskin Nasional didasarkan pada data RTS hasil PPLS-10 BPS. Pagu raskin untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat.

2) Pagu Raskin untuk setiap Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan pagu Raskin Nasional.

3) Penetapan pagu Raskin untuk setiap Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota, berdasarkan pagu Raskin Nasional.

|  |
| --- |
| **Tabel 1.1** |
| **Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Alokasi Pagu Raskin** |
| **di Kecamatan Pontianak Utara** |
| **Tahun 2011** |
|  |  |  |  |  |
| **NO** | **Kelurahan** | **Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) (Kepala Keluarga)** | **Jumlah Alokasi Pagu Raskin (15Kg)** |
|
|
| **Kg/Bulan** | **Kg/Tahun** |
| 1 | Siantan Hulu |  1,714  |  25,710  |  308,520  |
| 2 | Siantan Tengah |  1,366  |  20,490  |  245,880  |
| 3 | Siantan Hilir |  1,020  |  15,300  |  183,600  |
| 4 | Batu Layang |  1,074  |  16,110  |  193,320  |
| **Total** |  **5,174**  |  **77,610**  |  **931,320**  |
| *Sumber : Data Olahan 2012* |  |  |

Berdasarkan data tabel 1.1 maka dapat dilihat bahwa Kecamatan Pontianak Utara memiliki 4 (empat) kelurahan yang memiliki jumlah keseluruhan Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebesar 5.174 kk yang tersebar dimasing-masing kelurahan, dengan alokasi pagu Raskin 15 Kg/kk/bulan. Untuk Kecamatan Pontianak Utara sendiri menerima jumlah pagu raskin 77.610 kg untuk setiap bulannya dan 931.320 kg untuk setiap tahunnya dalam 12 kali penyaluran Raskin dalam satu tahun.

 Bila dilihat dari data kelurahan yang memiliki jumlah RTS terbesar adalah Kelurahan Siantan Hulu dengan jumlah 1.714 kk, sehingga dalam satu bulan Kelurahan Siantan Hulu memperoleh Pagu Raskin sebesar 25.710 kg dan 308.520 kg untuk setiap tahun. Sedangkan kelurahan yang memiliki jumlah RTS terkecil adalah Kelurahan Siantan Hilir dengan jumlah 1.020 kk. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian di daerah Siantan Hulu dikarenakan memiliki jumlah RTS terbesar untuk Kecamatan Pontianak Utara.

 Kondisi kemiskinan di Kota Pontianak khususnya Kecamatan Pontianak Utara Kelurahan Siantan Hulu dapat dilihat dari salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dan kualitas perumahan dan pemungkiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencarian yang tidak menentu sehingga masalah tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dengan semakin meningkatnya angka kemiskinan, maka permasalahan sosial sebagai dampak kemiskinan juga bertambah, seperti: masalah lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, pendapatan perkapita, meningkatnya angka kriminalitas, berkembangnya konflik-konflik sosial antar masyarakat dan makin rendahnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan hidup.

* 1. **Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah keberhasilan dan efektivitas dari pelaksanaan program Raskin di kelurahan Siantan Hulu, apakah sudah memenuhi indikator 6 Tepat (6T), yaitu: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah/Kuantitas, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, Tepat Mutu/Kualitas.
2. Apakah ada surplus konsumen yang diperoleh dari subsidi Raskin yang telah dilaksanakan.
3. Apa saja yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program Raskin.
	1. **Pembatasan Masalah**

Agar analisis pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai maka penulis memberikan batasan pada aspek-aspek sebagai berikut:

1. Responden adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS) di kecamatan Pontianak Utara kelurahan Siantan Hulu.

1. Penelitian ini menggunakan batasan bahwa pengeluaran konsumsi dasar RTS yang bersangkutan adalah berupa makan sehari-hari (pangan), Pakaian (sandang), tempat tinggal (papan), pendidikan dan kesehatan, sebagaimana petunjuk teknis BPS dalam Statistik Kemiskinan Kalbar.
2. Pendistribusian Raskin dikatakan efektif apabila raskin yang dilaksanakan telah memenuhi target 6 Tepat, yaitu:

a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat: Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Mudes/Muskel yang terdapat dalam DPM-1.

1. Tepat Jumlah: Jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.
2. Tepat Harga: Harga tebus Raskin adalah Rp.1.600,00/kg/netto di TD.
3. Tepat Waktu: Waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana penyaluran.
4. Tepat Administrasi: Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
5. Tepat Kualitas: Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG.
	1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui keberhasilan dan efektivitas dari program Raskin yang telah dijalankan di kelurahan Siantan Hulu.
2. Mengetahui apakah ada surplus konsumen yang diperoleh dari subsidi Raskin.
3. Mengetahui kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program Raskin.
	1. **Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

* + - 1. Bagi Akademis

Sebagai sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mempelajari masalah-masalah kemiskinan dan program dan kebijakan yang dilakukan pemerintah.

* + - 1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Perum BULOG dan pemerintah, sebagai bahan acuan dalam mengambil kebijakan untuk menanggulangi atau mengurangi tingkat kemiskinan yang ada khususnya yang berhubungan dengan distribusi beras miskin di kelurahan Siantan Hulu kecamatan Pontianak Utara.

* 1. **Landasan Teori**

Pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, yang mana pemerintah menyiapkan berbagai program pengentasan kemiskinan yang tersebar di berbagai instansi pemerintah. Program-program itu antara lain berupa bantuan cash atau langsung, bantuan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Menurut Sukirno (2004:445), pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam aspek lain dalam perekonomian seperti perkembangan pendidikan, perkembangan kemahiran tenaga kerja, perbaikan teknologi dan kenaikan taraf kemakmuran masyarakat. Kemiskinan diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokrasi, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga suatu Negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka sendiri, sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi dan sumber daya, Basri (2002;98-99). Dengan kata lain, kemiskinan di Indonesia disebabkan sangat terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiiki kelompok tersebut dalam mengakses sumber daya pembangunan.

 Menurut Basri (2002;99) “Untuk menghapus masalah kemiskinan yang kini semakin krusial di Indonesia, perlu dilakukan langkah-langkah merombak struktur yang otoritarian dan monopolistik, dengan strategi penguatan posisi politik dan ekonomi masyarakat miskin.”

Dalam studi yang dilakukan Sumarto (2002) yang dikutip oleh Kuncoro (2004;149) bahwa “Terdapat hubungan negatif yang sangat kuat antara pertumbuhan dan kemiskinan. Artinya, ketika perekonomian tumbuh, kemiskinan berkurang namun ketika perekonomian mengalami kontraksi pertumbuhan, kemiskinan kembali meningkat. dan, pertumbuhan kontemporer dapat mengurangi kemiskinan, sehingga pertumbuhan yang berkelanjutan penting untuk mengurangi kemiskinan”. Kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan dan ketimpangan untuk memenuhi kebutuhan dasar, dengan kata lain kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, Kuncoro (2004;144).

Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah suatu batas yang disebut batas garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dam non-makanan. Menurut Kuncoro (2003;148-149), garis kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

 Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari 2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan *(food line)* dan garis kemiskinan non-makanan *(non-food line)*, Kuncoro (2004;142). Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi (*consumtion-based poverty line)* terdiri dari dua elemen, yaitu: (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, (2) Jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, Kuncoro (2003:123).

Menurut Kuncoro (2003:122), kemiskinan dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu :

1. Kemiskinan absolute, di mana dengan pendekatan ini didefinisikan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu.
2. Kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain, kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Sharp, et.al (1996:173-191) yang dikutip oleh Kuncoro (2003:131-132) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi yaitu:

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini dikarenakan rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.
3. Penyebab kemiskinan tersebut bermuara pada lingkaran setan kemiskinan *(Vicius Circles of poverty)*. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi akan menyebabkan keterbelakangan.

Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, ekonomi pembangunan ternama, di tahun 1953, yang mengatakan: *“a poor country is poor because it is poor”* (Negara/orang miskin itu miskin karena dia miskin).

Pemerintah pun mengambil beberapa kebijakan yaitu kebijakan harga maksimum dan menstabilkan pendapatan. Menurut Sukirno (2005;146) kebijakan harga maksimum adalah kebijakan Pemerintah yang menetapkan harga sesuatu barang lebih rendah dari harga yang akan ditetapkan oleh interaksi diantara permintaan dan penawaran apabila mekanisme pasar dibiarkan berfungsi, yang mana kebijakan tersebut berupa Program Raskin yang memberikan subsidi harga beras lebih murah dari pada harga dipasar, sedangkan menstabilkan pendapatan adalah kebijakan pemerintah untuk menghindari agar pendapatan tidak mengalami naik turun yang besar dari waktu ke waktu dan berada pada tingkat yang relatif tinggi, yang mana Pemerintah menstabilkan pendapatan Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan cara memberikan harga subsidi pangan berupa beras yang lebih murah dari harga pasar sehingga ada sisa pendapatan yang bisa dialokasikan untuk tabungan atau kebutuhan selain konsumsi.

Kebijakan lain adalah subsidi Raskin yang memberikan subsidi harga beras murah untuk keluarga miskin, Menurut Sukirno (2005;146) subsidi adalah bantuan uang atau material (benda) yang diberikan kepada konsumen atau produsen sesuatu barang, misalnya subsidi beras. Bila kita lihat dari pola konsumsi sebagian besar masyarakat miskin yaitu mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka untuk konsumsi sehingga memiliki tabungan dan investasi yang rendah, kebijakan Pemerintah dibidang pangan sangat membantu, yang mana masyarakat miskin diberi subsidi harga beras yang lebih murah dibandingkan harga dipasar, sehingga pendapatan yang ada tidak sepenuhnya dialokasikan untuk beban konsumsi, sehingga pendapatan yang ada dapat dialihkan untuk tabungan, investasi, dan modal yang berguna untuk meningkatkan produktivitas.

Sedangkan menurut pendapat Sudantoko & Hamdani (2009:43) jenis-jenis kemiskinan ada beberapa yaitu :

1. Kemiskinan relative merupakan kondisi masyarakat karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.
2. Kemiskinan absolute ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bias hidup dan bekerja.
3. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan.
4. Sedangkan kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan.

Pola konsumsi masyarakat yang belum mapan biasanya lebih didominasi oleh konsumsi kebutuhan-kebutuhan pokok atau primer seperti pangan, sandang, dan pakaian. (Dumairy, 1996:114). Kepuasan seorang konsumen dari mengkonsumsi suatu barang biasanya lebih tinggi dari pengorbanan (pembayaran) yang dibuat untuk memperoleh barang tersebut. Perbedaan diantara keduanya dinamakan surplus konsumen. Menurut Sukirno (2005;165) Surplus konsumen: Kelebihan kenikmatan konsumen dalam mengkonsumsi sesuatu barang apabila dibandingkan dengan pembayaran yang perlu dilakukan untuk memperoleh barang tersebut.

Undang-undang No.7 tahun 1996 tentang pangan menyatakan bahwa pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Program Raskin termasuk pada kluster 1 (satu) yang mana melalui program ini pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan hak atas pangan, dan memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin sebagai pendukung bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Program ini sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas dalam memenuhi hak dasar masyarakat miskin terhadap kebutuhan dan ketahanan pangan, (Pedum Raskin 2011). Adapun Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program Rakin adalah :

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996, tentang Pangan.
3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang No. 10 Tahun 2010, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011.
6. Undang-Undang No.16 Tahun 1986, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.8 Tahun 1985.
7. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan.
8. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG.
9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten.
11. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
12. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2010, tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011.
13. Inpres kebijakan Pengadaan dan Penyaluran gabah/beras oleh Pemerintah.
14. Permendagri No. 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Kepmenko Kesra No. 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.
	1. **Metode Penelitian**
		1. **Metode Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode penelitian dengan memberikan gambaran serta fakta-fakta suatu keadaan dan objek penelitian yang ada di lapangan untuk memecahkan masalah dan melihat sejauh mana pelaksanaan dari Program Beras untuk Keluarga Miskin (Program Raskin). Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek / objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

* + 1. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pontianak Utara tepatnya pada kelurahan Siantan Hulu, karena di kelurahan tersebut yang tergolong keluarga miskin lebih banyak diantara kelurahan yang ada di Kecamatan Pontianak Utara yaitu sebanyak 1714 KK.

* + 1. **Sumber Data**

Sumber data dalam kegiatan penelitian ini, penulis mengunakan dua sumber data yaitu :

Data primer, diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti serta mengumpulkan data dengan melakukan wawancara serta menyebarkan kuisioner kepada masyarakat penerima program bantuan Raskin guna memperoleh data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original (Kuncoro, 2003;127). Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait yaitu instansi pemerintah seperti data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kal-Bar, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, Perum BULOG dan Instansi-instansi yang terkait dalam penelitian ini.

* + 1. **Populasi dan Sampel**

Adapun populasi dan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Populasi menurut Kuncoro (2003:108) adalah: “Suatu kelompok dari elemen penelitian, dimana elemen adalah unit terkecil yang merupakan sumber dari data yang diperlukan”. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat penerima bantuan Program Raskin di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara sebanyak 1714 KK.
2. Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi, dan oleh karena itu jenis sampel yang diambil harus mencerminkan populasi. Menurut Kuncoro (2003;103) pada dasarnya sampel merupakan suatu himpunan bagian dari populasi yang memperoleh perlakuan penelitian yang secara keseluruhan mempunyai sifat yang sama dengan sifat populasi, sampel merupakan wakil yang representative dari populasi khususnya dalam hal pendataan. Data yang dianalisis dalam suatu penelitian biasanya merupakan data dari hasil pengukuran yang diperoleh dari sampel.

Didalam pengambilan sampel ini penulis menggunakan cara *simple random sampling* yaitu dimana pemilihan sampel dilakukan dengan pertimbangan atau penyesuaian tertentu dengan cara yang paling sederhana dan mudah yang dikaitkan dengan tujuan penelitian. Untuk itu penulis mengambil 100 KK dari 1714 KK sebagai responden penerima bantuan Program Raskin di Kelurahan Siantan Hulu dikarenakan sampel bersifat homogen (sejenis/sama) dan memudahkan dalam pendataan.

* + 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuisioner dan wawancara langsung serta data dari instansi yang terkait.

* + 1. **Teknik Analisi Data**

Setelah melihat dan mempelajari permasalahan dan data yang diperoleh sebagai bahan acuan dan landasan teori untuk dianalisis maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menjabarkan hasil penelitian sebagaimana adanya, data yang telah didapatkan dari hasil penelitian dilapangan kemudian dikumpulkan serta diolah dan dianalisis dengan menggambarkan, menjelaskan, dan memberikan komentar dengan menggunakan tabel, setelah itu dari jawaban tersebut ditarik kesimpulan dan penjelasan. Teknik yang digunakan untuk melihat, mengukur dan menganalisis tingkat keberhasilan dan keefektifan penyaluran Raskin yang didasarkan pada Indikator 6 (enam) Tepat, yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah/Kuantitas, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, Tepat Mutu/Kualitas, maka digunakan kuesioner yang mana data dari kuesioner diolah dalam tabel dan dilihat persentase. Berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Yanita Sari;2007) mengukur dengan kriteria jika lebih besar atau sama dengan 80% dikatakan efektif dan jika berada dibawah 80% dikatakan tidak efektif.

Sedangkan Surplus Konsumen merupakan keuntungan yang diperoleh konsumen karena harga yang belaku pada kondisi keseimbangan lebih rendah dari harga yang dibayarkan. semakin besar perbedaan harga tersebut maka semakin tinggi surplus konsumen yang diperoleh rumah tangga. Besarnya surplus konsumen ini dihitung dari selisih harga beras dipasar yang biasa dikonsumsi dikurangi harga beras susidi dan dikalikan dengan kuantitas pembeliannya, dengan rumus sebagai berikut:

 **SK = ( Pa - Pk ) x Q**

dimana :

SK = Surplus konsumen (Rp)

Pa = Harga beras dipasar (Rp)

Pk = Harga beras subsidi (Rp)

Q = Jumlah yang diperjual belikan (Kg).

**Analisis dan Pembahasan**

* 1. **Efektivitas Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin)**
		1. **Tepat Sasaran**

**Tabel 3.1**

**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Ketepatan Sasaran Program Raskin yang Ditujukan Bagi Keluarga Miskin**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jawaban Responden** | **Frekuensi (Jiwa)** | **Persen** |
|
| 1 | Tepat Sasaran  | 63 | 63% |
| 2 | Kurang Tepat Sasaran | 37 | 37% |
| **Jumlah** | 100 | 100% |
| *Sumber: Analisis data kuesioner, 2012* |  |  |

Berdasarkan data tabel 3.1 dapat diketahui bahwa para responden sebanyak 63 orang (63%) mengatakan program raskin yang dilaksanakan di Kelurahan Siantan Hulu ini tepat sasaran, dalam arti kata beras miskin ini ditujukan kepada keluarga miskin yang membutuhkan, yang telah ditetapkan dalam penetapan RTS-PM raskin, tim kordinasi raskin melakukan musyawarah desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat, perwakilan RTS-PM dan BPS, melalui musyawarah tersebut dilakukan verifikasi terhadap daftar RTS dengan mengganti RTS yang tidak layak atau pindah alamat dengan RTS yang layak yang belum terdaftar. RTS hasil verifikasi dimasukan dalam DPM-1 dan ditetapkan sebagai RTS-PM raskin oleh kepala desa/lurah serta disahkan oleh camat. selanjutnya RTS-PM hasil verifikasi tersebut diberi kartu raskin sebagai identitas penerima raskin.

Sebagian responden sebanyak 37 orang (37%) mengatakan kurang tepat sasaran karena tidak seluruh keluarga miskin menerima beras raskin dan banyak kelurga tidak miskin yang menerima raskin, hal ini dikarenakan pelaksanaan musyawarah tidak optimal karena kurang melibatkan masyarakat, yang mana musyawarah tersebut dilakukan untuk menajamkan atau verifikasi sasaran yang layak. akan tetapi pada kenyataannya musyawarah yang dilakukan hanya formalitas untuk membenarkan pembagian raskin secara merata termasuk kepada penerima raskin dari keluarga tidak miskin. berbagai alasan muncul salah satunya adalah agar tidak terjadi konflik dan menghindari kecemburuan sosial dari rumah tangga yang tidak terdaftar. Sehingga pelaksanaan raskin dikatakan tidak tepat sasaran.

* + 1. **Tepat Jumlah**

**Tabel 3.2**

**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Ketepatan Jumlah (Kg) Beras Raskin Yang Dibagikan Sebanyak 15 Kg/KK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jawaban Responden** | **Frekuensi (Jiwa)** | **Persen**  |
|
| 1 | Ya | 91 | 91% |
| 2 | Tidak | 9 | 9% |
| **Jumlah** | 100 | 100% |
| *Sumber: Analisis data kuesioner, 2012* |  |  |

Berdasarkan data tabel 3.2 dapat diketahui bahwa para responden sebanyak 91 orang (91%) mengatakan mendapatkan pembagian jumlah beras raskin sebanyak 15 Kg perbulan per kepala keluarga, yang mana para responden mendapatkan beras dengan kemasan 15 Kg disetiap karungnya untuk setiap bulan pendistribusian beras Raskin di Kelurahan Siantan Hulu. Hal ini dapat terlaksana dikarenakan adanya upaya dan ketegasan dari para petugas pendistribusian raskin.

 Sedangkan ada sebagian responden sebanyak 9 orang (9%) mengatakan bahwa jumlah beras yang terdapat didalam karung tidak sesuai 15 Kg akan tetapi kadang-kadang hanya 13-14 Kg saja, menurut informasi hasil wawancara dengan petugas pendistribusian kekurangan tersebut dikarenakan karung tidak sengaja terkena ganju oleh truk pada saat beras diantar di titik distribusi. Namun demikian dibeberapa daerah juga masih terdapat pembagian beras raskin yang tidak tepat 15 Kg dikarenakan berbagai faktor dan kendala. Sedangkan untuk Kelurahan Siantan Hulu sudah memenuhi tepat jumlah berdasarkan hasil pengamatan dilapangan dan wawancara.

* + 1. **Tepat Harga**

**Tabel 3.3**

**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Ketepatan Harga (Rp) Beras Raskin Yang Dibagikan Sebesar Rp. 1600,-/Kg**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jawaban Responden** | **Frekuensi (Jiwa)** | **Persen**  |
|
| 1 | Ya | 100 | 100% |
| 2 | Tidak | 0 | 0% |
| **Jumlah** | 100 | 100% |
| *Sumber: Analisis data kuesioner, 2012* |  |  |

Berdasarkan data tabel 3.3 dapat diketahui bahwa para responden di Kelurahan Siantan Hulu sebanyak 100 orang (100%) menyatakan mendapatkan beras raskin dengan harga Rp. 1600,-/Kg di titik distribusi (TD) yang merupakan titik bagi (TB) beras raskin yang bertempat di kantor kelurahan siantan hulu, yang mana lokasi mudah dijangkau oleh para RTS.

Sedangkan dibeberapa daerah lain berdasarkan penelitian SMERU dan sumber yang ada terdapat harga beras raskin yang lebih tinggi dibandingkan harga ketetapan Rp. 1600,-/Kg di titik distribusi dikarenakan berbagai faktor yang menjadi penyebabnya, baik faktor yang bersumber dari kekurangjelasan dan kekurangtegasan maupun faktor teknis dan non teknis, antara lain adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada RTS sehingga harga beras raskin tidak lagi Rp. 1600,-/Kg tetapi lebih tinggi dikarenakan titik distribusi (TD) lebih jauh dari titik bagi (TB) yang mana memerlukan biaya operasinal agar dapat menyalurkan beras raskin ke tempat RTS yang jaraknya lebih jauh dari titik distribusi (TD).

Adanya biaya penimbangan apabila beras raskin yang disalurkan menggunakan ukuran karung bukan 15 Kg, yang mana semua itu berdasarkan kesepakatan musyawarah desa/kelurahan yang dilakukan oleh aparat desa/kelurahan bersama perwakilan dari RTS dan telah menemukan kata sepakat. Karena bagi RTS kebutuhan pangan sangat penting dan mereka tetap akan membelinya sepanjang harganya masih dibawah harga pasar yang berlaku. Pendistribusian beras raskin di Kelurahan Siantan Hulu dikatakan sudah tepat harga yaitu sebesar Rp.1600,-/Kg/bulan.

**Tabel 3.4**

**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Harga Beras Lain Yang Dikonsumsi Selain Beras Subsidi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jawaban Responden (Rupiah)** | **Frekuensi (Jiwa)** | **Persen**  |
|
| 1 | 5000-6000 | 77 | 77% |
| 2 | 6100-7000 | 23 | 23% |
| **Jumlah** | 100 | 100% |
| *Sumber: Analisis data kuesioner, 2012* |  |  |

Berdasarkan data tabel 3.4 dapat diketahui bahwa para responden di Kelurahan Siantan Hulu sebanyak 77 orang (77%) mengkonsumsi beras selain beras subsidi dari pemerintah seharga Rp.5000 – Rp.6000 dan sebanyak 23 orang (23%) mengkonsumsi beras seharga RP.6100 – Rp.7000, dikarenakan kebutuhan konsumsi yang besar dalam satu bulan dan memiliki jumlah anggota kelurga yang tidak sedikit sehingga jumlah beras subsidi yang disalurkan kurang mencukupi.

* + 1. **Tepat Waktu**

**Tabel 3.5**

**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Tanggal Penerimaan Raskin Setiap Bulan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jawaban Responden** | **Frekuensi (Jiwa)** | **Persen**  |
|
| 1 | Tanggal 1-10 | 71 | 71% |
| 2 | Tanggal 11-20 | 29 | 29% |
| 3 | Lainnya | 0 | 0% |
| **Jumlah** | 100 | 100% |
| *Sumber: Analisis data kuesioner, 2012* |  |  |

Berdasarkan data tabel 3.5 dapat diketahui bahwa para responden di Kelurahan Siantan Hulu sebanyak 71 orang (71%) menyatakan membeli dan menerima raskin pada tanggal 1 – 10 disetiap bulannya dan sebanyak 29 orang (29%) membeli pada tanggal 11 – 20 dikarenakan pembagian raskin di Kelurahan Siantan Hulu menggunakan sistem pembagian kelompok agar tidak terjadi penumpukan RTS pada saat antri untuk pembelian raskin, adapun pembagian kelompok dibagi menurut RT/RW dan kondisi keuangan para RTS supaya pendistribusian raskin tersebut berjalan dengan lancar.

**Tabel 3.6**

**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Penerimaan Raskin Dalam Setahun**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jawaban Responden** | **Frekuensi (Jiwa)** | **Persen**  |
|
| 1 | 10 bulan dalam setahun | 0 | 0% |
| 2 | 11 bulan dalam setahun | 0 | 0% |
| 3 | 12 bulan dalam setahun | 100 | 100% |
| **Jumlah** | 100 | 100% |
| *Sumber: Analisis data kuesioner, 2012* |  |  |

Berdasarkan data tabel 3.6 dapat diketahui bahwa para responden di Kelurahan Siantan Hulu sebanyak 100 orang (100%) menyatakan menerima pendistribusian beras raskin 12 kali dalam setahun, karena petugas dari pihak kecamatan/kelurahan memantau langsung proses pendistribusian beras sampai kepada RTS setiap bulannya.

**Tabel 3.7**

**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Ketepatan Waktu Menerima Raskin Setiap Bulan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jawaban Responden** | **Frekuensi (Jiwa)** | **Persen**  |
|
| 1 | Ya | 100 | 100% |
| 2 | Tidak | 0 | 0% |
| **Jumlah** | 100 | 100% |
| *Sumber: Analisis data kuesioner, 2012* |  |  |

Berdasarkan data tabel 3.7 dapat diketahui bahwa para responden di Kelurahan Siantan Hulu sebanyak 100 orang (100%) menyatakan menerima raskin tepat waktu setiap bulannya dikarenakan adanya kedisiplinan dari petugas kelurahan dalan pendistribusian raskin tersebut. Penyaluran raskin dilakukan tepat waktu merupakan upaya untuk mengantisipasi gejolak harga beras dipasaran yang sewaktu-waktu bisa mengalami peningkatan. Dalam studi SMERU menemukan bahwa disebagian besar wilayah sudah berhasil mencapai indikator tepat waktu, meskipun demikian terdapat beberapa daerah yang melakukan distribusi tidak sesuai pola karena berbagai alasan, antara lain : ada masalah administrasi dan pembayaran, ada pemerintah daerah yang mengajukan pendistribusian raskin dua bulan sekali karena kurangnya pagu, dan ada pemerintah daerah yang meminta raskin hanya disalurkan ketika musim panceklik.

* + 1. **Tepat Administrasi**

**Tabel 3.8**

**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pembagian Kartu Raskin Pada Setiap Tahun**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jawaban Responden** | **Frekuensi (Jiwa)** | **Persen**  |
|
| 1 | Ya | 100 | 100% |
| 2 | Tidak | 0 | 0% |
| **Jumlah** | 100 | 100% |
| *Sumber: Analisis data kuesioner, 2012* |  |  |

Berdasarkan data tabel 3.8 dapat diketahui bahwa para responden di Kelurahan Siantan Hulu sebanyak 100 orang (100%) menyatakan menerima pembagian kartu raskin pada saat sosialisasi raskin yang dilakukan oleh petugas kelurahan setiap tahun sebelum pendistribusian raskin mulai berjalan dan berdasarkan data dapat diketahui bahwa mayoritas responden di Kelurahan Siantan Hulu sebanyak 100 orang (100%) menyatakan penyaluran dan pendistribusian raskin telah berjalan dengan baik dimana penyaluran yang dilakukan hanya berada pada satu titik yaitu dikantor kelurahan. Dengan demikian tidak terjadi kebingungan dimasyarakat mengenai masalah penyaluran raskin ini.

**Tabel 3.9**

**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Bagaimana Cara Mendapatkan Raskin Setiap Bulan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jawaban Responden** | **Frekuensi (Jiwa)** | **Persen**  |
|
| 1 | Kupon | 100 | 100% |
| 2 | Lain nya | 0 | 0% |
| **Jumlah** | 100 | 100% |
| *Sumber: Analisis data kuesioner, 2012* |  |  |

Berdasarkan data tabel 3.9 dapat diketahui bahwa mayoritas responden di Kelurahan Siantan Hulu sebanyak 100 orang (100%) menyatakan bahwa mereka mendapatkan kupon yang dibagikan oleh petugas kelurahan dan ketua RT yang sebelumnya dilakukan pendataan kartu raskin untuk diparaf sesuai bulan penyaluran raskin.

 Penggunaan kupon berfungsi untuk mengindari orang ataupun pihak yang tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja masuk kedalam antrian yang sama untuk memperoleh raskin, sehingga kupon juga memberi kemudahan bagi petugas dalam melakukan pembagian dan pendataan sesuai daftar DPM, dimana bagi siapa pun orang yang tidak memegang kupon beras maka orang tersebut tidak akan mendapatkan raskin.

**Tabel 3.10**

**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pendataan Penerima Raskin Pada Setiap Bulan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jawaban Responden** | **Frekuensi (Jiwa)** | **Persen**  |
|
| 1 | Ya | 100 | 100% |
| 2 | Tidak | 0 | 0% |
| **Jumlah** | 100 | 100% |
| *Sumber: Analisis data kuesioner, 2012* |  |  |

Berdasarkan data tabel 3.10 dapat diketahui bahwa mayoritas responden di Kelurahan Siantan Hulu sebanyak 100 orang (100%) menyatakan bahwa petugas kelurahan selalu melakukan pendataan setiap bulannya, dikarenakan ada kemungkinan perubahan data yang masuk dan berganti antara satu keluarga miskin dengan keluarga miskin lainnya. sehingga pendistribusian raskin di Kelurahan Siantan Hulu telat tepat administrasi.

* + 1. **Tepat Kualitas**

**Tabel 3.11**

**Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kualitas Beras Raskin Yang Didistribusikan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jawaban Responden** | **Frekuensi (Jiwa)** | **Persen**  |
|
| 1 | Baik | 100 | 100% |
| 2 | Kurang Baik | 0 | 0% |
| **Jumlah** | 100 | 100% |
| *Sumber: Analisis data kuesioner, 2012* |  |  |

Berdasarkan data tabel 3.11 dapat diketahui bahwa mayoritas responden di Kelurahan Siantan Hulu sebanyak 100 orang (100%) menyatakan bahwa kualitas raskin yang didistribusikan saat ini adalah berkualitas medium kondisi baik dan tidak berhama sehingga dapat dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan standar kualitas Bulog dan pembelian pemerintah yang diatur dalam perundang-undangan.

**Tabel 3.12**

**Persentase Tingkat Efektivitas Distribusi Beras Raskin**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Tingkat Efektivitas** | **Tepat (%)**  | **Tidak Tepat (%)** | **Jumlah (%)** |
|
| 1 | Tepat Sasaran | 63 | 37 | 100 |
| 2 | Tepat Jumlah | 91 | 9 | 100 |
| 3 | Tepat Harga | 100 | 0 | 100 |
| 4 | Tepat Waktu | 100 | 0 | 100 |
| 5 | Tepat Administrasi | 100 | 0 | 100 |
| 6 | Tepat Kualitas | 100 | 0 | 100 |
|   | **Rata-rata** |   | 92.3333333 | 7.66666667 | 100 |
| *Sumber: Analisis olahan data kuesioner, 2012* |  |

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keenam indikator yang dilakukan di Kelurahan Siantan Hulu menunjukan tingkat efektivitas pendistribusian raskin dengan rata-rata sebesar 92,33% yang dapat disimpulkan bahwa program pendistribusian raskin dinilai efektif karena susah memenuhi enam tepat (6T) lebih dari 80%. walaupun dibanyak daerah tidak menutup kemungkinan terjadi banyak pendistribusian yang tidak efektif karena tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan enam indikator yang ditetapkan.

* 1. **Keuntungan Yang Diperoleh Rumah Tangga Miskin (Surplus Konsumen)**

Surplus konsumen adalah keuntungan yang diperoleh konsumen karena membeli suatu barang atau komoditi. Keuntungan tersebut diperoleh karena harga yang berlaku pada kondisi keseimbangan lebih rendah dari pada harga yang dibayarkan.

Pada tabel 3.13 menunjukan surplus konsumen atau keuntungan yang diperoleh rumah tangga miskin dengan adanya subsidi beras raskin.

**Tabel 3.13**

**Surplus Konsumen Yang Diperoleh Rumah Tangga Penerima Beras Raskin**

**Berdasarkan Nilai Rata-rata**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harga Beras di Pasar/ Kg (Rupiah)** | **Harga Beras Raskin/ Kg (Rupiah)** | **Jumlah Beras Raskin yang Diterima (Kg)** | **Jumlah Uang untuk Beras di Pasar (Rp)** | **Jumlah Uang untuk Beras Raskin (Rp)** | **Surplus Konsumen (Rupiah)** |
|
| **5710** | **1600** | **15** | **85650** | **24000** | **61650** |
| *Sumber: Analisis olahan data kuesioner, 2012 (lampiran 3)* |  |

Berdasarkan tabel 3.13 dapat dilihat angka rata-rata dari hasil penelitian yang dilakukan. Surplus konsumen untuk beras raskin yang dikonsumsi adalah selisih antara harga beras lain yang terdapat dipasar yang dikonsumsi para RTS dengan harga beras raskin yang disubsidi dikalikan dengan kuantitas beras raskin yang diperjual belikan yang dapat dilihat dari perhitungan sebagai berikut :

**SK = ( Pa - Pk ) x Q**

dimana :

SK = Surplus konsumen (Rp)

Pa = Harga beras dipasar (Rp)

Pk = Harga beras subsidi (Rp)

Q = Jumlah yang diperjualbelikan (Kg)

**SK = (5710-1600) x 15**

 **= (85650) - (24000)**

 **= 61650**

 Berdasarkan tabel 3.13 dan perhitungan diketahui bahwa harga beras dipasar yang dikonsumsi oleh rumah tangga miskin yaitu Rp.5.710 per Kg yang merupakan hasil rata-rata yang diambil dari 100 sampel rumah tangga miskin. Harga tersebut merupakan harga yang seharusnya dibayarkan jika tidak ada subsidi pangan dari pemerintah berupa beras miskin (RASKIN), harga beras berkisar antara Rp.5.000 per kg hingga Rp.7.000 per kg sehingga diperoleh rata-rata Rp.5.710 per kg. Sedangkan harga beras bersubsidi yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.1.600 per kg dengan kuantitas sebesar 15 kg per bulan.

Berdasarkan data tersebut diperoleh surplus bagi rumah tangga miskin sebesar Rp.61.650 per kepala keluarga yang membeli beras dengan harga yang lebih murah yaitu Rp.24.000 dibandingkan harga pasar yaitu Rp.85.650. Nilai tersebut merupakan keuntungan yang diterima oleh rumah tangga miskin dengan adanya subsidi dari pemerintah dibidang pangan yaitu raskin. Dengan adanya beras miskin seharga Rp.1.600 per kg, setidaknya dapat meringankan beban masyarakat yang kurang mampu memenuhi kebutuhan pangan.

 Surplus yang diperoleh rumah tangga miskin menunjukan terjadinya kelebihan kepuasan yang dinikmati oleh penerima manfaat raskin, kelebihan kepuasan ini muncul dari adanya perbedaan antara kepuasan yang diperoleh dalam mengkonsumsi beras raskin dengan pembayaran yang harus dikeluarkan untuk memperoleh beras tersebut. Selain memperoleh surplus konsumen dari harga beras raskin yang mendapat subsidi dari pemerintah, program raskin sendiri memberikan peluang kepada para penerima manfaat raskin untuk mengalokasikan sebagian pendapatan mereka untuk kebutuhan lain.

 Berdasarkan hasil wawancara dilapangan yang menyatakan sebagian pendapatan dapat dialihkan untuk ditabung dan untuk kebutuhan berupa kesehatan dan pendidikan bagi anggota keluarga, Dan para responden atau penerima raskin juga memiliki harapan kedepan untuk program raskin agar dapat lebih baik lagi dalam hal penambahan jumlah dan murahnya harga karena program raskin ini sangat membantu mereka memenuhi kebutuhan pangan dan meringankan beban hidup yang sudah sangat berat.

* 1. **Kendala dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Raskin**

**Tabel 3.14**

**Distribusi Jawaban Responden Memgenai Kendala dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Raskin**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jawaban Responden** | **Frekuensi (Jiwa)** | **Persen**  |
|
| 1 | Ada | 17 | 17% |
| 2 | Tidak  | 83 | 83% |
| **Jumlah** | 100 | 100% |
| *Sumber: Analisis data kuesioner, 2012* |  |  |

Berdasarkan data tabel 3.20 dapat diketahui bahwa mayoritas responden di Kelurahan Siantan Hulu sebanyak 83 orang (83%) menyatakan pendistribusian Raskin tidak mengalami kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan para responden dan petugas kelurahan, pelaksanaan pendistribusian raskin di Kelurahan Siantan Hulu tidak mengalami suatu kendala dan hambatan dikarenakan telah diatur dan dilakukan pengawasan agar tidak terjadi suatu kendala yang dapat menggangu tata tertib pembagian yang dilaksanakan setiap bulannya, hambatan dan kendala dapat dihindari karena titik distribusi (TD) menjadi satu dengan titik bagi (TB) yaitu dikantor kelurahan yang lokasinya mudah dijangkau sehingga memudahkan dalam pelaksanaan. Sedangkan ada 17 orang (17%) menyatakan pelaksanaan Raskin ada mengalami kendala ketika pembagian gelombang pada saat pengambilan beras raskin, yang mana responden tersebut mendapatkan gelombang kedua pada pertengahan bulan sehingga dana untuk membeli raskin telah terpakai untuk keperluan yang lain.

Selain itu pembagian gelombang ini hanya didasarkan pada pembagian wilayah RT saja sehingga kurang memperhatikan aspek penilaian yang lain, seperti jarak antar RT, kebutuhan dan kemampuan warga dalam mengalokasikan dana, dan kemampuan warga dalam mengantri dikarenakan ada sebagian responden yang memiliki usia lanjut.

Bila kita melihat pelaksanaan raskin didaerah lain tidak menutup kemungkinan kendala dan hambatan dari pelaksanaan raskin ini ada, hal yang paling sering menjadi hambatan adalah lokasi dari daerah distribusi yang sulit dicapai karena sarana dan prasarana belum mendukung, jarak menuju lokasi pendistribusian sangat jauh baik jarak antara titik distribusi dan titik bagi sehingga menimbulkan adanya biaya tambahan, serta prilaku masyarakat yang kurang bersahabat karena berada didaerah pedalaman, sehingga kecendrungan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan dari program raskin ini.

**Kesimpulan dan Saran**

* 1. **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Evaluasi Program Raskin (beras untuk keluarga miskin) di kelurahan Sia ntan Hulu sudah berjalan dengan efektif. Dimana hal tersebut terbukti dengan tingkat keberhasilan rata-rata keseluruhan dari enam indikator program raskin sebesar 92,33% yang menunjukan lebih besar dari 80% sehingga dikatakan efektif. Hal tersebut diperoleh berdasarkan jawaban responden yang menyatakan bahwa program beras raskin yang dilaksanakan tepat sasaran penerima manfaat sebesar 63%, tepat harga penjualan raskin kepada RTS Rp.1600,- per kilogram sebesar 100%, tepat jumlah dalam hitungan berat 15kg per kepala keluarga sebesar 91%, tepat waktu dalam setiap pendistribusian pembagian beras kepada para penerima manfaat raskin sebesar 100% dan tepat administrasi penyaluran raskin sebesar 100% serta tepat kualitas beras raskin untuk dikonsumsi sebesar 100%.
2. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa diperoleh surplus bagi rumah tangga miskin sebesar Rp.61.650 per kepala keluarga yang membeli beras dengan harga yang lebih murah yaitu Rp.24.000 per 15 kg dengan harga Rp.1600 per kilogram dibandingkan harga pasar yaitu Rp.85.650 per 15 kg dengan harga Rp.5710 per kilogram. Nilai tersebut merupakan keuntungan yang diterima oleh rumah tangga miskin dengan adanya subsidi dari pemerintah dibidang pangan yaitu raskin. Dengan adanya beras miskin seharga Rp.1.600 per kg, setidaknya dapat meringankan beban masyarakat yang kurang mampu memenuhi kebutuhan pangan.
3. Pelaksanaan pendistribusian raskin di Kelurahan Siantan Hulu tidak mengalami suatu kendala dan hambatan dalam memperoleh beras raskin oleh para responden dan menyalurkan beras raskin disetiap pendistribusian yang dilakukan oleh petugas kelurahan, dikarenakan telah diatur dan dilakukan pengawasan agar tidak terjadi suatu kendala yang dapat menggangu tata tertib pembagian yang dilaksanakan setiap bulannya, hanya saja ada 17 orang (17%) menyatakan mengalami kendala pembagian gelombang pembagian raskin yang menyebabkan dana untuk alokasi raskin terpakai untuk keperluan lain dikarenakan mendapat gelombang akhir pengambilan raskin.
	1. **Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan penulis sebagai suatu masukan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi yang luas dan efektif dengan menekankan bahwa raskin hanya untuk rumah tangga miskin yang sudah ditentukan, dan penetapan rumah tangga penerima harus dilakukan secara serius, tegas dan konsisten dalam pendataan maupun verifikasinya agar lebih mempertajam sasaran serta menghindari sistem bagi rata sehingga menutup akses untuk rumah tangga tidak miskin memperoleh raskin, sehingga indikator tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah dilakukan secara efektif.
2. Pengawasan terhadap harga beras raskin yang disalurkan agar lebih diperketat sehingga mengindari adanya biaya tambahan dari oknum tidak bertanggung jawab sehingga nilai surplus konsumen tetap ada guna memenuhi alokasi kebutuhan yang lain dan indikator tepat harga dapat dilaksanakan secara efektif.
3. Untuk mengurangi dan mencegah adanya hambatan dan kendala di dalam pendistribusian raskin perlu adanya upaya dari pemerintah daerah bersama tim koordinasi raskin untuk mengambil ketegasan dan kebijakan dalam menentukan titik distribusi dan titik bagi sehingga memudahkan dalam proses penyaluran raskin tersebut.
4. Pemikiran untuk menggunakan beras dengan nilai sosoh rendah tetapi mempunyai kandungan gizi lebih tinggi perlu lebih dipertimbangkan karena akan lebih menjamin tercapainya pemenuhan kebutuhan energi protein dengan syarat kualitas beras tetap terjaga.
5. Para RTS-PM Raskin juga diharapkan agar tidak merasa tergantung kepada subsidi beras dari pemerintah untuk terus menerus dapat membeli beras secara murah. Namun agar masyarakat lebih giat dan lebih bekerja keras lagi dalam usaha untuk mencari ataupun menciptakan suatu pekerjaan yang bisa meningkatkan taraf kehidupan. Sehingga dapat memenuhi kebutuahan pokok secara mandiri dan tidak mengharapkan kepada subsidi yang diberikan oleh pemerintah setiap bulannya. Walaupun pada kenyataannya masyarakat tetap mengharapakan program raskin dilakukan secara berkelanjutan.
6. Pemerintah diharapkan lebih memberikan bantuan berupa modal sebagai penggerak usaha masyarakat miskin, memberikan bantuan penyuluhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola sektor penting bagi peningkatan kesejahteraan, sehingga dapat terciptanya kemandirian dan peluang terciptanya lapangan pekerjaan baru.

**DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pusat Statistik, (BPS). (2009). *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2009*,Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik, (BPS). (2010). *Kota Pontianak Dalam Angka 2010* Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik, (BPS). (2011). *Pontianak Utara Dalam Angka 2011* Jakarta: Badan Pusat Statistik

Badan Urusan Logistik, (BULOG). (2011). *Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2011* Jakarta: Perum Bulog.

Basri, Faisal. (2002). *Perekonomian Indonesia:* *Tantangan Dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad. (2003). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan,* Edisi Ketiga, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.

Kuncoro, Mudrajad. (2003). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Penerbit Erlangga, Yogyakarta.

Sudantoko Djoko dan Hamdani Mulyawan. (2009). *Dasar-dasar Pengantar Ekonomi Pembangunan,* PT. PP. Mardi Mulyo, Jakarta.

Sukirno, Sadono. (2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar,* Edisi Ketiga, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Sukirno, Sadono. (2005). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar,* Edisi Ketiga, Penerbit PT. Rajawali Pers, Jakarta

\_\_\_\_\_\_. (2011). *Monografi Kelurahan Siantan Hulu,* Pontianak. Kalimantan Barat.

SUMBER WEBSITE

Hastuti,dkk.2011. *Tinjauan Efektivitas Pelaksanaan Raskin dalam Mencapai Enam Tepat*.http://www.smeru.or.id/report/workpaper/raskin/raskinmencapaienamtepat.pdf (diakses tanggal 20 agustus 2012)

<http://bappenas.go.id/ciri> dan kriteria kemiskinan. (diakses tanggal 18 juli 2012)

<http://www.bps.go.id/indikator-indikator> kemiskinan.(diakses tanggal 18 juli 2012)

http://www.Bulog.co.id/uupangan\_v2.php (diakses tanggal 7 september 2012)

Sari,Yanita.2007. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi distribusi raskin* <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7492/1/09E00242.pdf> (diakses tanggal 19 juli 2012)

Suharto,Edi.2002. *Pendekatan Pekerjaan Sosial Dalam Menangani Kemiskinan di Tanah Air*. <http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_29.htm> (diakses tanggal 19 juli 2012)